

1. Judul Kegiatan	:	Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya Yang Berdampak Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia
2. Bidang Kegiatan	:	() PKM-AI (x) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan		
a. Nama Lengkap	:	Dadang Kurniawan
b. NIM	:	C14062625
c. Jurusan	:	Budidaya Perairan
d. Universitas/Institut/Politeknik	:	Institut Pertanian Bogor
e. Alamat Rumah dan No Tel./HP	:	Pondok Yasmin, Jl. Bara 2. Darmaga, Bogor 16680 085287781705
f. Alamat email	:	nte_dangkoerniaone@yahoo.co.id
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	:	3 orang
5. Dosen Pendamping		
a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Dr. Dinamella Wahjuningrum
b. NIP	:	19700521 199903 2 001
c. Alamat Rumah dan No Tel./HP	:	Jl.Cemara Kipas I/21 Sektor 2, Taman Yasmin, Bogor / 08159233468

Bogor, 24 Maret 2010

Menyetujui,
Kepala Departemen Budidaya Perairan

(Dr. Odang Carman)
NIP. 19591222 198601 1001

Wakil rektor
Bidang Kemahasiswaan,

(Prof.Dr.Ir.H. Yonny Koesmaryono)
NIP. 195812281985031002

Ketua Pelaksana kegiatan,

(Dadang Kurniawan)
NIM. C14062625

Dosen Pendamping,

(Dr. Dinamella Wahjuningrum)
NIP. 19700521 199903 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mengasihi kami, dan berkehendak atas kami untuk menuangkan permasalahan-permasalahan yang ada disekeliling kita dan gagasan-gagasan ke dalam sebuah karya tulis.

Tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, tetapi belum mampu menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Sumber daya perikanan adalah salah satu sumber yang potensial yang seharusnya dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia sehingga tidak dianalogikan lagi seperti “tikus yang kelaparan di lumbung padi”.

Menyebutkan Menteri Perikanan Indonesia, Fadel Muhammad, mencanangkan program mengenai peningkatan produksi hasil perikanan dari sektor budidaya yang mencapai tiga kali lipatnya dari produksi awal. Hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pemberdayaan sumber daya manusia. Tidak bisa tidak suatu keinginan hanya sekedar harapan tanpa melihat kondisi sebenarnya yang terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu dukungan dan kerjasama diantara semua pihak yang terkait untuk memajukan perikanan Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semoga target produksi perikanan Indonesia tahun 2014 mendatang dapat tercapai dan dapat menyejahterakan kehidupan petani Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	1
GAGASAN	2
Kondisi Perikanan Dunia	2
Kesejahteraan Petani Ikan dan Masyarakat Umum	2
Aksesibilitas Petani Terhadap Sumber-Sumber Permodalan	3
Pola Pikir Petani	4
Perhatian Pemerintah Dewasa Ini	4
Peranan Pihak Terkait	5
Langkah-Langkah Strategis Pengimplementasian Gagasan	5
KESIMPULAN	6
DAFTAR PUSTAKA	6
LAMPIRAN	7
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	8

RINGKASAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program revolusi biru yang menargetkan produksi perikanan budidaya Indonesia naik tiga kali lipat, yaitu sebesar 5,38 juta ton pada tahun 2010 dan 16,89 juta ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 353%. Permasalahannya adalah kurang optimalnya peranan KKP karena hanya menargetkan persentase saja dan tidak diikuti dengan jaminan apabila terjadi *over supply* mengingat produk perikanan ini bersifat *high risk*, serta jaminan lainnya seperti mudahnya akses pasar, modal awal bagi petani ikan, misalnya semacam KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta birokrasi yang mudah. Atas permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu tindakan yang konkret dan terintegrasi dari pemerintah dalam hal ini KKP serta beberapa gagasan gagasan yang dapat dijadikan sebagai bahan kontribusi dalam memaksimalkan sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat petani. Beberapa gagasan yang dapat diimplementasikan diantaranya merubah kebijakan orientasi dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam rangka pencapaian target produksi, memangkas berbagai birokrasi yang berbelit-belit yang dapat mengurungkan niat pelaku usaha untuk berusaha, dan untuk menghindari berbagai praktik korupsi, misalnya dari sektor perbankan dan administrasi pendirian usaha, memperluas akses petani/pelaku usaha ke sumber-sumber modal, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya menargetkan persentase yang ingin dicapai saja, tetapi harus ada program yang terintegrasi antara target yang ingin dicapai dengan faktor pendukungnya, melakukan pendekatan persuasif kepada petani bahwa modal yang diberikan untuk dikembalikan lagi, dan perlu adanya kebijakan tertentu bila usaha mengalami kegagalan, serta perlu dibentuk bank khusus pertanian yang peranannya memberikan modal usaha tetapi tidak dibebani dengan bunga yang tinggi.